



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**RANCANGAN
AKHIR
RENCANA
KERJA**

TAHUN 2023





**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 188.45/ 49 /BUP-PASBAR/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023**

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Menyebutkan Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali dengan Persiapan Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

B. Sekretaris

1. Mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

C. Kelompok Kerja

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi capaian kinerja Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
3. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sesuai visi dan misi serta

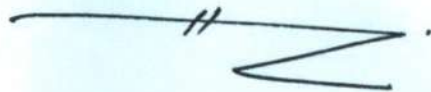
- sasaran kepala daerah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
4. Melaksanakan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
 6. Merumuskan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 7. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan;
 8. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat 2023;
 9. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja;
 10. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dan ;
 11. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,



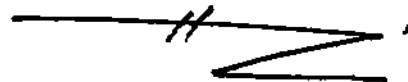
H. HAMSUARDI

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
 Nomor : 188.45/49 /BUP-PASBAR/2022
 Tanggal : 21 Januari 2022
 Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat
 Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023**

Jabatan Dalam Tim	Jabatan
Ketua	Sekretaris Daerah
Sekretaris	Kabag Perencanaan dan Keuangan
Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dan Kesra	
Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Anggota	Kabag Pemerintahan
Anggota	Kabag Pemerintah Nagari
Anggota	Kabag Hukum
Anggota	Kabag Kesejahteraan Rakyat
Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Anggota	Kabag Perekonomian dan SDA
Anggota	Kabag Administrasi Pembangunan
Anggota	Kabag Pengadaan Barang/jasa
Kelompok Kerja Bidang Administrasi Umum	
Koordinator	Asisten Administrasi Umum
Anggota	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Anggota	Kabag Organisasi
Anggota	Kabag Umum
Anggota	Kasubag Perencanaan

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.....	10
2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d Tahun 2022 Sekretariat Daerah.....	12
2.1.2 Evaluasi Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021.....	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	27
2.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN OPD	37
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	39
3.3 Rencana Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD.....	50
4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan 2023.....	50
BAB V PENUTUP.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses dan upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari kondisi saat ini. Agar pembangunan mencapai hasil yang diinginkan sangat diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang matang dan terpadu yang mencakup semua aspek yang terkait dengan perencanaan itu sendiri. Perencanaan pembangunan daerah peranannya semakin penting dalam memetakan potensi yang ada secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian alam dan lingkungan, dengan tujuan strategi yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara komprehensif dan sistematis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan pedoman kerja bagi Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan pada Sekretariat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan OPD dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja juga merupakan bentuk jaminan terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan dan menjadi salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja sebagaimana tercantum pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 berisi dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam kerangka regulasi dan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Kab. Pasaman Barat.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sekretariat Daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana, Penelitian dan Pengembangan serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat disusun secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) melalui proses pemikiran strategis dalam menyikapi isu-isu yang berkembang untuk kemudian diimplementasikan dalam program dan kegiatan OPD.

Pada tahapan selanjutnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pasaman Barat tahun 2023. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan serta mengevaluasi rencana yang telah disusun.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 - 2030;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
24. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Sekretariat Daerah serta sebagai

perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang terintegrasi pada Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama periode 1 (satu) tahun;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan;
3. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi serta tolok ukur kinerja Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengingat arti strategis Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Memuat ketentuan antara lain:

- 1) Memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;

- 2) Berpedoman pada Renstra OPD dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;
- 3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
- 4) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
- 5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan penutup.
- 6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan menjadi rancangan RKPD Pemerintah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan OPD*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja OPD*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021 sekretariat daerah melaksanakan 5 program, 22 kegiatan dan 64 sub kegiatan. Keseluruhan kegiatan merupakan penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai penunjang urusan pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021 berdasarkan rencana kerja sebagaimana telah disusun. evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2022 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah pada tahun sebelumnya serta yang akan datang.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2021 serta capaian kinerja tahun berjalan (TA 2022) disajikan pada Tabel 2.1.1 dan Tabel 2.1.2 di bawah ini :

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S.D TAHUN 2022

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	Usuan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	% (Kinerja)	% (Keuangan)
1	2	3	4				5				15=14/6*10	
	SEKRETARIAT DAERAH		100%	45.420.914.183	100%	42.616.955.654	100%	47.662.705.762	50%	17.723.210.636	50%	37,18
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Penataan Nagari sesuai Perundang-Undangan yang Berlaku	100%	132.966.200	100%	111.732.750	100%	70.297.000	25%	29.701.800	25%	42,25
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Nagari	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	132.966.200	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	111.732.750	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	70.297.000	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	29.701.800	99%	42,25
1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Nagari Hasil Pemekaran yang Dievaluasi	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	132.966.200	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	111.732.750	16 Nagari	70.297.000	19 Nagari	29.701.800	100%	42,25
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari dengan Tata Kelola Administrasi Minimal Baik	100%	432.533.800	100%	415.187.763	100%	194.703.000	97%	102.758.316	97%	52,78
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Nagari yang Dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	432.533.800	100%	415.187.763	100%	194.703.000	90%	102.758.316	90%	52,78
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Nagari yang Dilikuti	91 Kali	90.009.100	91 Kali	87.776.000						
3	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Nagari yang Difasilitasi	100 Perna	95.249.900	100 Perna	91.710.150						

4	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Nagari dengan Pengelolaan Keuangan Minimal Baik	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	56.022.500	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	48.771.263							
5	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	128.377.600	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	125.460.400							
6	Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa	90 Perbup	62.874.700	90 Perbup	61.469.950	90 Perbup	83.114.000	90 Perbup	34.056.350	100%	40,98	
7	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Bimbingan Peningkatan Kapasitas BPD			78 Nagari		78 Nagari	58.325.000	78 Nagari	22.885.000	100%	39,24	
8	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Bimbingan Peningkatan Kapasitas Aparatur			78 Nagari		78 Nagari	53.264.000	78 Nagari	45.816.966	100%	86,02	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama Otonomi Daerah	100%	3.988.319.863	100%	3.804.862.700	100%	3.049.250.000	58%	935.221.387	58%	30,67	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Administrasi Tata Pemerintahan	100%	458.974.913	100%	415.257.222	100%	248.980.000	55%	117.941.969	55%	47,37	
9	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Penataan Administrasi Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	4 kegiatan	210.495.750	4 Kegiatan	189.643.150	20 Kali	98.368.000	11 Kali	49.530.019	55%	50,35	
10	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Administrasi Kewilayahan yang Dikelola	2 kegiatan	112.323.075	2 Kegiatan	99.220.600	3 Kecamatan	66.992.500	2 Kecamatan	12.698.200	67%	18,95	
11	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Dilaksanakan	3 kali	136.156.088	4 Kali	126.393.472	4 Kali	83.619.500	4 Kali	55.713.750	100%	66,63	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	3.100.630.000	100%	2.994.121.670	100%	2.444.250.000	80%	690.159.000	80%	28,24	
12	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan yang Difasilitasi	31 Kegiatan	2.900.227.000	31 Kegiatan	2.798.972.370	3 Kegiatan	2.243.028.000	2 Kegiatan	592.213.600	67%	26,40	

13	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Monitoring Implementasi Kebijakan dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Sosial	12 Pertemuan	200.403.000	12 Pertemuan	195.149.300	12 Pertemuan	150.700.000	6 Pertemuan	72.744.900	50%	48,27
14	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Monitoring Implementasi Kebijakan dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Masyarakat						50.522.000	2 Kegiatan	25.200.500	67%	49,88
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		100%	408.629.850	100%	377.298.708	100%	340.000.000	50%	127.120.418	50%	37,39
15	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda,Perkada) yang Diundangkan dan Ditetapkan	556 Produk	113.258.100	556 Produk	110.792.300	556 Produk	86.964.500	300 Produk	53.073.018	54%	61,03
16	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	3 Perkara	213.571.000	3 Perkara	185.943.728	3 Perkara	156.701.500	3 Perkara	26.263.700	100%	16,76
17	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumentasi Produk Hukum dan Jumlah Informasi Hukum yang Dikelola	556 Produk	81.800.750	556 Produk	80.562.680	556 Produk	96.334.000	300 Produk	47.783.700	54%	49,60
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	20.085.100	100%	18.185.100	100%	16.020.000	28%	-	28%	-
18	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dari Berbagai Bidang	100%	20.085.100	100%	18.185.100	100%	16.020.000	28%	-	28%	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100%	1.057.453.910	100%	931.238.758	100%	1.063.249.850	36%	316.186.563	36%	29,74
	Pelaksanaan Kebijakan perekonomian	Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	283.962.500	100%	276.591.608	100%	395.000.000	9%	102.971.613	9%	26,07
19	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD, BLUD yang Dibina	26 BUMD, BULD	110.996.050	26 BUMD, BULD	107.587.500	12 Kali	106.570.000	2 BUMD, BULD	27.028.873	25%	25,36
20	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perekonomian yang Dilaksanakan	12 kali	86.766.950	12 Kali	83.956.800	12 Kali	181.300.000	5 Kali	45.174.840	42%	24,92
21	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	12 kali	86.199.500	12 Kali	85.047.308	12 Kali	107.130.000	6 Kali	30.767.900	50%	28,72

	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	354.787.500	100%	261.986.750	100%	309.250.000	50%	106.871.900	50%	34,56
22	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Kontrak Pembangunan Konstruksi dan Non Konstruksi yang Sesuai Target Kegiatan Pembangunan Daerah	12 bulan	60.806.000	12 Bulan	53.003.750	12 Bulan	104.415.000	6 Bulan	68.012.650	50%	65,14
23	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan APBD ke TEPRU Pusat	12 laporan	105.270.000	12 Laporan	83.434.900	12 Laporan	74.057.500	6 Laporan	13.172.200	50%	17,79
24	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Kegiatan Pembangunan Daerah	14 Laporan	188.711.500	14 Laporan	125.548.100	14 Laporan	130.777.500	6 Laporan	25.687.050	43%	19,64
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Capaian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	418.703.910	100%	392.660.400	100%	358.999.850	96%	106.343.050	96%	29,62
25	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang Difasilitasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa	32 OPD	123.180.000	32 OPD	115.231.450	32 OPD	58.353.950	30 OPD	8.665.900	93,75%	14,85
26	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Sistem PSE Terstandar yang Dikelola	1 Sistem	191.409.000	1 Sistem	187.157.250	1 Sistem	236.691.750	1 Sistem	80.396.100	25%	33,97
27	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pelaku PBJ yang Mengikuti Sosialisasi	2 orang	104.114.910	2 Orang	90.271.700	2 Orang	63.954.150	5 Orang	17.281.050	250%	27,02
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	Persentase Terpenuhi nya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	100%	39.809.640.410	100%	37.353.933.683	100%	43.285.205.912	75%	16.339.342.570	75%	37,75
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Perangkat Daerah	100%	121.851.100	100%	119.162.839	100%	191.202.580	75%	82.568.150	75%	43,18
28	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Perencanaan Keuangan yang Difasilitasi	8 Laporan	121.851.100	8 Laporan	119.162.839	8 Laporan	191.202.580	6 Laporan	82.568.150	75%	43,18
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	24.288.806.465	100%	23.995.578.789	100%	26.226.435.777	50%	11.942.582.047	50%	45,54
29	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	21.132.914.065	1 Tahun	20.944.662.899	253 ASN	23.014.464.777	262 ASN	10.490.476.660	50%	45,58
30	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Pemenuhan Kebutuhan Operasional Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160 Orang	2.505.200.000	156 Orang	2.426.197.000	156 orang	2.577.300.000	156 orang	1.177.428.000	50%	45,68

31	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Dikelola	528 SPJ	541.664.300	528 SPJ	524.660.000	528 Dokumen	530.636.000	272 Dokumen	225.918.237	52%	42,57
32	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan atas Pelaksanaan Akuntansi yang Disusun	7 Laporan	109.028.100	7 Laporan	100.058.890	7 Laporan	104.035.000	4 Laporan	48.759.150	57%	46,87
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	215.187.000	100%	206.253.350	100%	169.087.000	50%	83.066.300	50%	49,13
33	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengurus Barang Milik Daerah yang Dibina	13 Orang	130.232.000	13 Orang	124.438.900	13 Orang	94.132.000	13 Orang	52.887.900	50%	56,18
34	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Fasilitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Instansi dan Masyarakat	364 Unit	84.955.000	364 Unit	81.814.450	364 Unit	74.955.000	364 Unit	30.178.400	50%	40,26
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	5.000.000	100%	2.280.000	100%	5.000.000	50%	-	50%	-
35	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Pelaksanaan Olah Data Retribusi Daerah sesuai Prosedur yang Beraku	12 bulan	5.000.000	12 Bulan	2.280.000	800 Dokumen	5.000.000	200 Dokumen	-	25%	
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100%	103.702.000	100%	90.062.700	100%	117.274.000	50%	23.208.000	50%	19,79
36	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakalan Dinas yang Diadakan	20 Orang	29.800.000	30 Orang	27.200.000	30 Stel	21.000.000	12 Stel	4.500.000	40%	21,43
37	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen dan Data Kepegawalan yang Dihasilkan	120 Dokumen	24.412.000	80 Dokumen	16.860.000	120 Dokumen	30.172.000	60 Dokumen	3.228.000	50%	10,70
38	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Melakukan Diklat	1 Orang	-	1 Orang	-	1 Orang	16.366.000		-		
39	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	3 Orang	49.490.000	3 Orang	46.002.700	5 Orang	49.736.000	4 Orang	15.480.000	80%	31,12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.658.562.698	100%	1.603.840.157	100%	2.889.440.748	50%	1.199.599.676	50%	41,52

40	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK, Alat Kebersihan, Material, dan Peralatan Lainnya	12 Bulan	182.428.000	12 Bulan	158.650.000	2 Bulan	183.403.050	6 Bulan	40.477.200	300%	22,07
41	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	71.500.000	12 Bulan	70.726.250	2 Bulan	71.500.000	6 Bulan	15.079.500	300%	21,09
42	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kebutuhan Konsumsi dan Akomodasi Tamu Pemerintah Daerah	500 Kali	301.847.500	360 Kali	278.619.250	500 Kali	304.847.500	28 Kali	45.525.000	6%	14,93
43	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120 Kali	1.102.787.198	100 Kali	1.095.844.657	120 Kali	2.329.690.198	52 Kali	1.098.517.976	43%	47,15
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	4.223.900.858	100%	3.122.206.780	100%	6.071.411.140	20%	303.526.100	20%	5,00
44	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Jabatan dan Dinas	4 Unit	1.404.650.000	1 Unit	359.900.000	6 Unit	3.064.600.000		-		
45	Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Meubel	4 Paket	750.093.280	4 Paket	748.469.280	4 Paket	359.548.940	1 Paket	61.690.000	25%	17,16
46	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	8 Paket	1.033.157.578	8 Paket	1.010.206.000	6 Paket	1.465.512.200	2 Paket	241.836.100	33%	16,50
47	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Paket	856.000.000	6 Paket	823.731.500	6 Paket	851.750.000		-		
49	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	180.000.000	1 Paket	179.900.000	1 Paket	330.000.000		-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.240.677.512	100%	2.075.930.218	100%	2.320.044.152	50%	1.196.721.655	50%	51,58
50	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terpenuhiinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	1.463.752.512	12 Bulan	1.353.880.168	12 Bulan	1.534.869.152	6 Bulan	846.431.134	50%	55,15
51	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhiinya Belanja Jasa Cleaning Service, Jasa Sewa Karangan Bunga dan Jasa Sewa Rumah Singgah Pemerintah Daerah	12 Bulan	776.925.000	12 Bulan	722.050.050	12 Bulan	785.175.000	6 Bulan	350.290.521	50%	44,61
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	1.863.938.030	100%	1.563.607.270	100%	1.312.998.532	70%	256.996.087	70%	19,57

52	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan KDH/WKDH	2 Unit	123.704.300	2 Unit	92.752.400	2 Unit	114.676.800	2 Unit	15.649.200	100%	13.65
53	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	91 Unit	907.799.500	91 Unit	835.944.970	88 Unit	655.410.310	88 Unit	152.911.387	50%	23.33
54	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin yang Berada dalam Kondisi Baik	100%	470.684.230	100%	273.353.900	100%	310.355.000	13,61%	42.267.500	25%	13.62
55	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor, Rumah Jabatan KDH/WKDH, Rumah Dinas Sekda dan Balerong Rumah Kepala Daerah, Gedung Pemda, dan Gudang	6 Bangunan	361.750.000	6 Bangunan	361.556.000	6 Bangunan	232.556.422	6 Bangunan	46.166.000	25%	19.85
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	100%	904.429.820	100%	755.164.897	100%	904.429.820	50%	355.063.416	50%	39.26
56	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	244.429.820	12 Bulan	156.414.897	12 Bulan	244.429.820	6 Bulan	83.207.216	50%	34,04
57	Penyediaan Pakai Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan WKDH	Jumlah Pakai Dinas KDH/WKDH yang Disediakan dalam 1 Tahun	24 Stel	175.000.000	24 Stel	175.000.000	24 Stel	175.000.000	15 Stel	40.500.000	62,50%	23,14
58	Pelaksanaan Medical Check Up KDH dan WKDH	Terfasilitasinya Pelaksanaan Medical Check Up KDH/WKDH	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	-	12 Bulan	35.000.000	3 Bulan	6.356.200	25%	18,16
59	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah	12 Bulan	450.000.000	12 Bulan	423.750.000	12 Bulan	450.000.000	5 Bulan	225.000.000	41,67%	50,00
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Fasilitas Kerumahtanggaan di Lingkungan Sekretariat Daerah	12 Bulan	1.892.354.380	12 Bulan	1.665.246.914	12 Bulan	1.960.685.130	6 Bulan	546.243.084	50%	27.86
60	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Bulan	992.359.984	12 Bulan	867.908.842	12 Bulan	991.966.230	6 Bulan	304.640.788	50%	30,71

61	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 bulan	514.807,176	12 Bulan	443.453.680	12 Bulan	581.482.230	6 Bulan	138.998.994	50%	23.90
62	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	12 Bulan	385.187.220	12 Bulan	353.884.392	12 Bulan	387.236.670	6 Bulan	102.603.302	50%	26.50
	Penataan Organisasi	Persentase Capaian Pelaksanaan Penataan Organisasi	100%	242.401.500	100%	215.355.335	100%	234.250.000	50%	81.677.055	50%	34.87
63	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang Menyusun Dokumen Anjab dan ABK Berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja	32 OPD	90.047.700	32 OPD	82.537.585	32 OPD	71.451.500	20 OPD	29.991.500	63%	41.97
64	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Daerah	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Jumlah Pembinaan SOP dan Standar Pelayanan	8 Kali	68.031.300	8 Kali	52.625.400	8 Kali	94.260.000	4 Kali	22.667.500	50%	24.05
65	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen LKPI dan PK Kab. Pasaman Barat, Dokumen Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	84.322.500	3 Dokumen	80.192.350	3 Dokumen	68.538.500	3 Dokumen	29.018.055	50%	42.34
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Capaian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	2.048.829.047	100%	1.939.244.434	100%	882.947.033	50,00%	268.091.000	50,00%	30.36
66	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan Daerah	130 Kali	345.748.797	130 Kali	328.349.672	200 Kali	409.482.423	100 Kali	157.146.500	50,00%	38.38
67	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan yang Difasilitasi	385 Kali	1.218.490.000	385 Kali	1.143.228.654	80 Kali	4.800.000	10 Kali	-	12,50%	
68	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Media Cetak	18 Kali	484.590.250	18 Kali	467.666.108	280 Kali	458.664.610	100 Kali	110.944.500	35,71%	23.67

EVALUASI REALISASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun tahun 2021
1	2	3	4	5	6
	SEKRETARIAT DAERAH		100%	100%	100%
I	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Tindak Lanjut Penataan Nagari sesuai Perundang-Undangan yang Berlaku	100%	100%	100%
I	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Nagari	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	100%
1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Nagari Hasil Pemekaran yang Dievaluasi	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	100%
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari dengan Tata Kelola Administrasi minimal Baik	100%	100%	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Nagari yang Dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Nagari yang Diikuti	91 Kali	91 Kali	100%
3	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Nagari yang Difasilitasi	100 Perna	100 Perna	100%
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah nagari dengan pengelolaan keuangan minimal baik	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	95%
5	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	19 Nagari Induk/71 Nagari Hasil Penataan	90%
6	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa	90 Perbup	90 Perbup	100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%

7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Perencanaan Keuangan yang <i>Difasilitasi</i>	8 Laporan	8 Laporan	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Tujnjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100%
9	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Pemenuhan Kebutuhan Operasional Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160 orang	160 orang	100%
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Dikelola	528 SPJ	528 SPJ	100%
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan atas Pelaksanaan Akuntansi yang <i>Disusun</i>	7 laporan	7 laporan	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%
12	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengurus Barang Milik Daerah yang Dibina	13 orang	13 orang	100%
13	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Fasilitasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Instansi dan Masyarakat	364 Unit	364 Unit	100%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%
14	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Pelaksanaan Olah Data Retribusi Daerah sesuai <i>Prosedur yang Berlaku</i>	12 bulan	12 bulan	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	20 orang	30 orang	100%
16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen dan Data Kepegawaian yang Dihasilkan	120 dokumen	80 dokumen	100%
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Melakukan Diklat	1 orang	1 Orang	100%
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti <i>Bimtek</i>	3 orang	3 orang	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%

19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK, Alat Kebersihan, Materai, dan Peralatan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kebutuhan Konsumsi dan Akomodasi Tamu Pemerintah Daerah	500 Kali	360 Kali	100%
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120 Kali	100 Kali	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
23	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Jabatan dan Dinas	4 unit	1 unit	25,00
24	Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Meubel	4 paket	4 paket	100%
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	8 paket	8 paket	100%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Paket	6 Paket	100%
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
27	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%
28	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terpenuhinya belanja jasa cleaning service, jasa sewa karangan bunga dan jasa sewa rumah singgah Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
29	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya kendaraan jabatan KDH/WKDH	2 unit	2 unit	100%
30	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/lapangan	91 unit	91 unit	100%

31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin yang berada dalam kondisi baik	100%	100%	100%
32	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor, rumah jabatan KDH/WKDH, rumah dinas Sekda dan Balerong Rumah Kepala Daerah, Gedung Pemda, dan Gudang	6 bangunan	6 bangunan	100%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan administrasi keuangan dan operasional KDH/WKDH	100%	100%	100%
33	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan	12 bulan	100%
34	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan WKDH	Jumlah pakaian dinas KDH/WKDH yang disediakan dalam 1 tahun	24 stel	24 stel	100%
35	Pelaksanaan Medical Check Up KDH dan WKDH	Terfasilitasinya pelaksanaan medical check up KDH/WKDH	12 bulan	12 Bulan	100%
36	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan kebutuhan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan	12 bulan	100%
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan fasilitasi kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
37	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
38	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
39	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
	Penataan Organisasi		100%	100%	100%
40	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang menyusun dokumen anjab dan ABK berdasarkan kebutuhan dan beban kerja	32 OPD	32 OPD	100,00%
41	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, jumlah pembinaan SOP dan Standar Pelayanan	8 Kali	8 Kali	100%
42	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen LKPJ dan PK Kab. Pasaman Barat, Dokumen Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%	100%	100%
43	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kunjungan kerja pimpinan daerah	130 kali	130 kali	100%
44	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	jumlah rapat koordinasi pimpinan yang difasilitasi	385 kali	385 kali	100%
45	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui media cetak	18 kali	18 kali	100%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100%	100%	100%
	Administrasi Tata Pemerintahan		100%	100%	100%
46	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Penataan Administrasi Pemerintahan yang ditindaklanjuti	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
47	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Administrasi Kewilayahan yang dikelola	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
48	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilaksanakan	3 kali	4 kali	100%
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%	100%	100%
49	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	31 Kegiatan	31 Kegiatan	100%
50	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Frekwensi pelaksanaan rapat koordinasi dan monitoring implementasi kebijakan dan capaian kinerja kesejahteraan sosial	12 Pertemuan	12 Pertemuan	100%
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		100%	100%	100%
51	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum daerah (perda,perkada) yang diundangkan dan ditetapkan	556 Produk	556 Produk	100%
52	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum dan penanganan perkara litigasi dan non litigasi Pemerintah Daerah yang difasilitasi	3 Perkara	3 Perkara	100%
53	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah dokumentasi produk hukum dan jumlah informasi hukum yang dikelola	556 Produk	556 Produk	100%
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	persentase pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah	100%	100%	100%

54	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentasi Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dari berbagai Bidang	100%	100%	100%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100%	100%	100%
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		100%	100%	100%
55	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD, BLUD yang dibina	26 BUMD, BULD	26 BUMD, BULD	100%
56	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana perekonomian yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	100%
57	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	100%
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		100%	100%	100%
58	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Kontrak Pembangunan Konstruksi dan Non Konstruksi yang sesuai target kegiatan Pembangunan Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
59	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan APBD ke TEPPRA Pusat	12 laporan	12 laporan	100%
60	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Kegiatan Pembangunan Daerah	14 Laporan	14 Laporan	100%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%	100%	100%
61	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang difasilitasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa	32 OPD	32 OPD	100%
62	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah sistem PSE terstandar yang dikelola	1 Sistem	1 Sistem	100%
63	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pelaku PBJ yang mengikuti sosialisasi	2 orang	2 orang	100%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, pelayanan Sekretariat Daerah digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan. Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan

Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel
2. Tata kelola administrasi pertanahan belum optimal
3. Sistem tata kelola administrasi pemerintahan nagari yang belum optimal
4. Kapasitas SDM pamong nagari yang masih perlu ditingkatkan
5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan nagari
6. Peran pemerintah nagari dalam memberdayakan masyarakat masih belum optimal

7. Penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan yang di atasnya
 8. Kesadaran hukum aparaturnya dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan
 9. Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
 10. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang dinamis
 11. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah yang terbaru
 12. Keterbatasan sumber daya (modal, SDM) dalam pelaksanaan pembangunan daerah
 13. Belum optimalnya PAD
 14. Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan guna menghadapi persaingan global
 15. Kapasitas SDM komunikasi dan informasi perlu ditingkatkan
 16. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan
 17. Kelembagaan yang belum efektif dan efisien
 18. Penyelenggaraan persandian perlu ditingkatkan
 19. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati
 20. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah
 21. Penyelenggaraan yang harus sesuai dengan standar keprotokolan
- Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :
1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya
 2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
 3. Batas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dengan kabupaten lain sekitarnya masih belum jelas sehingga berpengaruh pada administrasi masyarakat

4. Kepemilikan tanah yang digunakan sebagai pendukung sarana prasarana untuk kepentingan umum belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten
5. Pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu dijamin oleh pemerintah
6. Belum adanya database kekayaan nagari yang akuntabel
7. Data dan informasi monografi nagari yang belum optimal
8. Pemahaman pamong nagari tentang aturan perundang-undangan tentang keuangan masih belum optimal
9. Peraturan perundang-undangan tentang tanah kas nagari mengalami perubahan
10. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga nagari belum optimal
11. Masih banyak peraturan perundang-undangan di daerah yang pengaturannya tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
12. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa
13. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal
14. Belum semua OPD memahami mekanisme kerjasama daerah
15. Kinerja BUMD yang belum optimal
16. Belum sinkronnya calon mitra kerja pendukung pengembangan UMKM dengan pelaku UMKM
17. Informasi yang diberitakan oleh mass media kurang berimbang
18. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal
19. Pelayanan informasi pada badan publik belum optimal
20. Belum tersedianya SOP atau standar ketatalaksanaan di seluruh OPD
21. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM
22. Kapasitas sebagian SDM persandian belum memadai
23. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati
24. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan Sekretariat Daerah

25. Pengelolaan aset yang belum optimal

26. Belum terlaksananya standar keprotokolan dalam acara resmi di seluruh OPD

27. Pelaksanaan acara kedinasan yang sesuai dengan standar keprotokolan belum optimal

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar **Rp. 41.333.564.076,-** (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2023. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan-kegiatan dari 3 program, 23 kegiatan dan 58 sub kegiatan yang direncanakan

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.4 (T.C 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja (Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Lokasi	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja (Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Lokasi	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	SEKRETARIAT DAERAH				41.333.564.076	SEKRETARIAT DAERAH				41.333.564.076
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.685.714.266	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.685.714.266
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115.982.130	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115.982.130
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115.982.130	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115.982.130
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.163.669.224	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.163.669.224
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	253 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.971.684.614	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	253 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.971.684.614
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	169 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.505.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	169 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.505.200.000

03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	528 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570.509.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	528 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570.509.000
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	116.275.610	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	116.275.610
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	305.211.247	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	305.211.247
01	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	13 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203.571.247	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	13 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203.571.247
02	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	364 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.640.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	364 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.640.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.260.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.260.000
01	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	800 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.260.000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	800 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.260.000
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	159.830.000	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	159.830.000
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	30 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.620.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	30 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.620.000

02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	120 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.930.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	120 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.930.000
03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.780.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.780.000
04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.871.666.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.871.666.500
01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203.500.000
02	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.166.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.166.500
03	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	363.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	363.000.000
04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.210.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.210.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.546.770.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.546.770.000
01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000

02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000
03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.089.770.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.089.770.000
04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	657.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	657.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.710.861.264	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.710.861.264
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.779.675.514	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.779.675.514
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	931.185.750	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	931.185.750
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.202.200.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.202.200.000
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152.460.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152.460.000
02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	88 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.074.480.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	88 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.074.480.000

03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	585.270.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	585.270.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	585.270.000
04	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	385.990.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	385.990.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	385.990.000
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.071.260.192	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.071.260.192	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.071.260.192
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	295.760.192	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	295.760.192	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	295.760.192
02	Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaiannya Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	192.500.000	Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	192.500.000	Jumlah Paket Pakaiannya Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	192.500.000
03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.500.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	38.500.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.500.000
04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	544.500.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	544.500.000	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	544.500.000
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.596.660.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.596.660.000	Persentase Capaian Pelaksanaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.596.660.000

01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.328.580.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.328.580.000
02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	780.450.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	780.450.000
03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	487.630.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	487.630.000
	Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.406.906	Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.406.906
01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	32 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.497.175	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	32 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.497.175
02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.340.507	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.340.507
03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.569.224	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.569.224
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Capaian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.733.936.803	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Capaian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.733.936.803
01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	130 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	302.083.050	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	130 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	302.083.050
02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	385 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.046.968.900	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	385 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.046.968.900

03	Perdokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	18 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	384.884.853	Perdokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	18 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	384.884.853
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama dan Otonomi Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.240.489.000	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama dan Otonomi Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.240.489.000
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	182.728.118	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	182.728.118
01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	25 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.606.942	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	25 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.606.942
02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.613.674	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.613.674
03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.507.502	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.507.502
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.775.039.765	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.775.039.765
01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.467.099.414	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.467.099.414

02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.375.211	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.375.211
03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan	3 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	206.565.140	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan	3 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	206.565.140
	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	232.721.117	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	232.721.117
01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	556 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.573.706	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	556 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.573.706
02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.573.705	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.573.705
03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	556 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.573.706	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	556 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.573.706
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000

01	Facilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	100 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000	50.000.000	Facilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	100 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	407.360.810	407.360.810	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	407.360.810
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156.992.095	156.992.095	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156.992.095
01	Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	26 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.563.768	52.563.768	Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	26 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.563.768
02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.563.768	52.563.768	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.563.768
03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.864.559	51.864.559	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.864.559
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125.383.952	125.383.952	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125.383.952
01	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.195.107	45.195.107	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.195.107
02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.309.385	34.309.385	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.309.385

03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	14 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.879.460	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	45.879.460	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124.984.763	45.879.460
	Pengadaan pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Capaian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124.984.763	Pengadaan pengadaan Barang dan Jasa	124.984.763	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Persentase Capaian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124.984.763	124.984.763
01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	32 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.062.718	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	31.062.718	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	32 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.062.718	31.062.718
02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.773.905	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	57.773.905	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.773.905	57.773.905
03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.148.140	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	36.148.140	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.148.140	36.148.140

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, ada terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024, yakni sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup menguatkan rencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran i Sekretariat Daerah Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUUAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan tata kelola kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Publik		2,51
				Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,04 (Sangat Tinggi)
		Meningkatnya Fungsi Koordinasi Pembangunan Daerah		Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesra yang diimplementasikan	93%
				Persentase Rumusan Kebijakan Ekonomi yang diimplementasikan	93%
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan yang diimplementasikan	100%
				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang / jasa	75,00
					69 (B)

		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah		Nilai SAKIP SETDA	80,50 (BB)
				Level Maturitas SPIP	3
				Persentase Penurunan Temuan Pemeriksaan	15%
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84

3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat selaku koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah bertanggung jawab mengkoordinasikan keselarasan program-program pembangunan daerah di seluruh OPD yang berada di bawah lingkup koordinasinya. Secara umum, rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Pasaman Barat Tahun 2023 tertuang dalam 3 program, 23 Kegiatan dan 58 Sub kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023

N0	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja (Program/Kegiatan /Sub Kegiatan)	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SEKRETARIAT DAERAH			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	253 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	169 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	528 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
01	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	13 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
02	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	364 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

01	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	800 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Subtotal				
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan	30 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	120 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Subtotal				
01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
02	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
03	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Subtotal				
01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	88 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
04	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
02	Penyediaan Pakailan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Program Pengembangan dan Penguatan Organisasi 01. Jumlah Organisasi yang memiliki organisasi di Kecamatan 02. Jumlah Organisasi yang memiliki organisasi di Kelurahan				
01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 01. Jumlah Organisasi yang memiliki organisasi di Kecamatan 02. Jumlah Organisasi yang memiliki organisasi di Kelurahan				
01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	32 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 01. Jumlah Organisasi yang memiliki organisasi di Kecamatan 02. Jumlah Organisasi yang memiliki organisasi di Kelurahan				
01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	130 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	385 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
03	Perdokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	18 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama dan Otonomi Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	25 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	556 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	3 Kasus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	556 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	100 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
01	Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	26 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	14 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Pengadaan pengadaan Barang dan jasa	Persentase Capaian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa	100%	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	32 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2023 merupakan implementasi tahun ke-3 dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat sasaran yang diukur melalui persentase pencapaian target kinerja RPJMD.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat haruslah yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi atas program/kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2023 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 3 program, 23 kegiatan dan 58 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kab. Pasman Barat pada tahun 2023 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp. 41.333.564.076,-** (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.012.12.50.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.012.12.50.01.0001 Bagian Umum

[illegible]

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.2.13.000.9.1.0000 Seleksi Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.13.000.9.1.0001 Bagian Umum

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prediksi Mula Rencana Tahun 2024	
			Sasaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dasar/ Pagu Indikatif (Rp.)
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	223,850,000
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	104,883,150
4 01 01 2.06 08	Fasilitas Kurjangan Temu	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kurjangan Temu	Penyediaan Paket Fasilitas Kurjangan Temu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Laporan	100 Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	399,300,000
4 01 01 2.06 09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Penyediaan Paket Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	120 Laporan	100 Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	1,391,000,000
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Paket Kendaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	1,960,887,000
4 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Paket Kendaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	750,000,000
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Penyediaan Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	200,000,000
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Perakitan dan Mebel Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Perakitan dan Mebel Lainnya yang Disediakan	Penyediaan Paket Perakitan dan Mebel Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	648,197,000
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Penyediaan Paket Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	362,700,000
4 01 01 2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Paket Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	2,981,547,391
4 01 01 2.08 02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Paket Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	1,957,643,066

Program dan Kegiatan Pemanggot Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.2.13.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.13.0.00.01.0001 Bagian Umum

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja Tahun 2024		Kebijakan Dasar/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tidak Malar	Target	
4 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	Pemerintah daerah	Semua Kabupaten	100 %	12 Laporan	100 Persen	931.185.750	Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.024.304.325
4 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Pemertintahan Daerah								2.282.200.000					2.432.439.000
4 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dires atau Kendaraan Dires Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Pemungut Unsur Pemertintahan Daerah dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan obayektan Pelajanya	Pemerintah daerah	Semua Kabupaten	100 %	2 Unit	100 Persen	152.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	167.706.000
4 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dires Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dires Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan obayektan Pajak dan Periznannya	Pemerintah daerah	Semua Kabupaten	100 %	88 Unit	100 Persen	1.074.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.181.928.000
4 01 2.09 06	Pemeliharaan Perakasan dan Meubelanyanya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Perakasan dan Meubelanyanya yang Dipelihara	Pemerintah daerah	Semua Kabupaten	100 %	100 Unit	100 Persen	589.270.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	648.197.000
4 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemerintah daerah	Semua Kabupaten	100 %	6 Unit	100 Persen	385.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	424.589.000
4 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								231.000.000					254.180.000
4 01 2.11 02	Penyediaan Pakan Obat dan Antibiotik Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakan Obat dan Antibiotik Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disiapkan	Pemerintah daerah	Semua Kabupaten	100 %	24 Paket	100 Persen	192.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	211.750.000
4 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemerintah daerah	Semua Kabupaten	100 %	12 Orang	100 Persen	38.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	42.350.000
4 01 2.12	Pelaksanaan Pemertintahan Daerah								2.586.460.000					2.856.328.000
4 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disiapkan	Pemerintah daerah	Semua Kabupaten	100 %	12 Paket	100 Persen	1.328.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.481.436.000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Paseran Barat
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.2.13.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.13.0.00.01.0001 Bagian Umum

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Rencana Misi Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Kekuatan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tingkat Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Tidak Urair	TARGET
4 01 01 212 02	Persediaan Kabupaten Rumah Tangga Wali Kepala Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pelat Kabupaten Rumah Tangga Wali Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase capaian pelaksanaan (adipati bermufakafat) seluruh daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kurahan	100 %	12 Pelat	780.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Catupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
4 01 01 212 03	Persediaan Kabupaten Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pelat Kabupaten Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Persentase capaian pelaksanaan (adipati bermufakafat) seluruh daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kurahan	100 %	12 Pelat	487.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Catupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
TOTAL									15.933.097.784			15.933.097.784

Unit Organisasi : 4.01.2.13.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.13.00.01.0002 Bagian Pemerintahan

5 of 13

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Paseran Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.012.19.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.012.19.00.01.0004 Bagian Unit Kerja Pemasukan Barang/Jasa

Auto-Print Organigram : 10/12/2023 09:00:00 12000															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unit Organisasi : 4.01.2.13.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.13.00.01.0005 Bagian Administrasi Pembastutan

7 of 13

Unit Organisasi : 4.01.2.13.0.00.01.0000 Sekretaris Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.13.0.00.01.0004 Bagian Organisasi

8 of 13

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.2.13.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.13.0.00.01.0007 Bagian Perencanaan

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023				Sumber Dana	Catatan Penting	Prediksi Mula Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokas Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Tingkat Ular	Target
						Program	Kebijakan Sub Kegiatan					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4		SEKRETARIAT DAERAH										
4	01	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN										
4	01 09	Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan										
4	01 09 2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan BLMD dan BLUD	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perencanaan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan BLMD dan BLUD	Persentase capaian pelaksanaan kebijakan perencanaan	100 %	26 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bahan kebijakan umum lingkup perencanaan yang ditindaklanjuti	100 %	
4	01 09 2.01 01	Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perencanaan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	Persentase capaian pelaksanaan kebijakan perencanaan	100 %	12 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bahan kebijakan umum lingkup perencanaan yang ditindaklanjuti	100 %	
4	01 09 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perencanaan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase capaian pelaksanaan kebijakan perencanaan	100 %	12 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bahan kebijakan umum lingkup perencanaan yang ditindaklanjuti	100 %	
4	01 09 2.01 03	Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perencanaan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase capaian pelaksanaan kebijakan perencanaan	100 %	12 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bahan kebijakan umum lingkup perencanaan yang ditindaklanjuti	100 %	
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095
										TOTAL		156,992,095

Unit Organisasi : 4.012.13.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.012.13.0.00.01.0000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Total

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaaman Barat
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.2.13.8.00.0.0.000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.13.8.00.0.0.000 Bagian Hukum

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Mend. Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prediksi Mula Rencana Tahun 2024			
			Capaian Program	Kekayaan Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Uraian			Target	Kebudayaan Dasar/ Pagi Indikator (Rp.)		
4															
4	01		UNSUR PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN											232,721,117	232,721,117
4	01		SEKRETARIAT DAERAH											232,721,117	232,721,117
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESELATANAN RAKYAT											232,721,117	232,721,117
4	01	02	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum										232,721,117		
4	01	02	2.03										232,721,117		
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Keljasama dan Otonomi Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	556 Dokumen 100 Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Keljasama dan Otonomi Daerah	100 %	77.570,706
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Keljasama dan Otonomi Daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Kasus 100 Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Keljasama dan Otonomi Daerah	100 %	77.570,705
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Keljasama dan Otonomi Daerah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	556 Dokumen 100 Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Keljasama dan Otonomi Daerah	100 %	77.570,706
TOTAL												232,721,117	232,721,117		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Prasman Bersi
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.2.13.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.13.0.00.01.0010 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Praktikan Maju Bersama Tahun 2024								
		Capaian Program	Kekayaan Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Maklumat Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indirect? (Rp.)	Sumber Dana	Target	Kebijakan Dasar/ Pagu Indirect? (Rp.)					
4																		
4	01										1,731,394,003					1,731,276,172		
4	01	01									1,731,394,003					1,731,276,172		
4	01	2.14									1,731,394,003					1,731,276,172		
4	01	2.14	01	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keptrocodan	Persentase capaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	130 Laporan	100 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		282,391,355		
4	01	2.14	02	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunitas Pimpinan	Persentase capaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	385 Laporan	100 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		1,051,665,790		
4	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase capaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		417,319,027		
											1,731,394,003						1,731,276,172	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.2.13.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.13.0.00.01.0011 Bagian Keuangan

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cetakan Peringkat	Prekisiun Madya Rencana Tahun 2024	
							Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tipek Uluar	Tipek
UNSUR PEMBUKUAN URUSAN PEMERINTAHAN														
SEKRETARIAT DAERAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ROTA														
4 01 01 2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Pembiayaan Kinerja Perangkat Daerah									20.818.262.793			21.496.042.811	127.960.343
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan capaian pelaksanaan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	100 Persen		115.982.130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
4 01 01 2.01 01										115.982.130				127.960.343
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									18.658.466.224				20.220.247.103
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan capaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	253 Orang/bulan	100 Persen		16.971.684.614	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
4 01 01 2.02 01										16.971.684.614				19.533.462.495
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD	Pemantapan capaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	528 Dokumen	100 Persen		570.509.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
4 01 01 2.02 03										570.509.000				570.509.000
4 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pemantapan capaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Dokumen	100 Persen		116.275.610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
4 01 01 2.02 04										116.275.610				116.275.610
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									203.571.247				223.528.372
4 01 01 2.03 01	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemantapan capaian pelaksanaan administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Laporan	100 Persen		203.571.247	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
4 01 01 2.03 01										203.571.247				223.528.372
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									840.260.192				924.266.211
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemantapan capaian pelaksanaan administrasi keuangan dan operasional KDH/WHKDH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Orang/bulan	100 Persen		235.760.192	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
4 01 01 2.11 01										235.760.192				325.336.211
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemantapan capaian pelaksanaan administrasi keuangan dan operasional KDH/WHKDH	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang/bulan	100 Persen		544.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
4 01 01 2.11 04										544.500.000				598.550.000
TOTAL										20.818.262.793	21.496.042.811			

BAB V

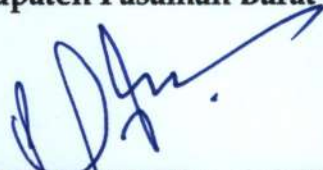
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja akan sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam pencapaian tujuan, program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk pembangunan 1 tahun kedepan. Selain sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan OPD pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, harapan terhadap pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi dan sinergis untuk mencapai hasil yang lebih baik dapat diwujudkan.

Simpang Empat, 11 Juli 2022

**Sekretaris Daerah
Kabupaten Pasaman Barat**



HENDRA PUTRA, S.STP
NIP. 19760430 199511 1 001